

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR
TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Empiris Pada Auditor BPK Perwakilan Wilayah Sumbar)

PROPOSAL SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

CARLI SAPUTRA S
2005/ 64844

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Auditor BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumatera Barat)**

NAMA : CARLI SAPUTRA SIHOMBING
TM / NIM : 2005 / 64844
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KRAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Eka Fauziahhardani, SE, M.Si, Ak

NIP. 19710522 200003 2 001

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

**Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi**

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus
Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

**Pengaruh Independensi dan Kompetensi Terhadap Kualitas Laporan Hasil
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi empiris pada Auditor BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar)**

Nama : Carli Saputra Sihombing
BP/NIM : 2005/ 64844
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 19 Agustus 2010

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	_____
2.	Sekretaris	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	_____
3.	Anggota	Lili Anita , SE, M.Si, Ak	_____
4.	Anggota	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	_____

ABSTRAK

Carli Saputra S. (2005/64844). Pengaruh Independensi dan Kompetensi Terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2010.

Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh independensi terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan LKPD, 2) Pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan LKPD.

Populasi dalam penelitian adalah auditor BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar. Penelitian menggunakan *total sampling*. Jenis penelitian adalah penelitian kausatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner. Yang menjadi responden pada penelitian ini adalah auditor BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 15.00.

Temuan penelitian ini menunjukkan: 1) Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan LKPD ditunjukkan dengan nilai sig. 0.042 lebih kecil dari 0.05, 2) Kompetensi berpengaruh signifikan positif pengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan LKPD dengan diperoleh besarnya nilai sig. 0.310 lebih kecil dari 0.05.

Hasil penelitian menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.141 menggambarkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 14,1% sedangkan sisanya sebesar 85,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan kepada Peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan hasil pemeriksaan LKPD seperti latar belakang pendidikan, profesionalisme, pengendalian mutu audit, perencanaan dan program kerja pemerikyaan, bukti yang cukup, kecukupan waktu, loyalitas dan pernyataan pendapat. Untuk auditor harus meningkatkan kompetensi dan independensinya agar kualitas laporan hasil pemeriksaannya lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Independensi dan Kompetensi Terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenalkan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
3. Ibu Eka Fauzihardani, SE ,M.Si,Ak selaku pembimbing I, atas perhatian dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
4. Bapak Fefri Indra Arza, SE ,M.Sc,Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
7. Ayah dan ibu yang telah memberikan perhatian, do'a, dan kasih sayang dan pengorbanan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.

8. Kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
 BAB II. TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS...	12
A. Kajian Teori	12
1. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	12
2. Independensi	22
3. Kompetensi	28
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Pengembangan Hipotesis	42
D. Kerangka Konseptual	45

BAB III. METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Populasi dan Sampel	47
C. Jenis Dan Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Variabel Penelitian	48
F. Pengukuran Variabel	49
G. Instrumen Penelitian	49
H. Uji Validitas dan Reabilitas	52
1. Uji Validitas	52
2. Uji Reliabilitas.....	53
I. Model dan Teknik Analisis Data	54
J. Definisi Operasional	59
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	62
B. Demografi Responden	62
1. Karakteristik Responden	62
2. Deskripsi Hasil Penelitian	64
C. Uji Instrumen	70
1. Uji Validitas	70
2. Uji Reliabilitas	71
D. Asumsi Klasik	72

E. Uji Model Penelitian	75
F. Uji Hipotesis	77
G. Pembahasan.....	78
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Instrumen Penelitian	50
2. Uji Valid Pilot Test	52
3. Uji Reliabel Pilot Test	54
4. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	62
5. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
6. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Formal	63
7. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	64
8. Distribusi Frekuensi Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	65
9. Distribusi Frekuensi Independensi	67
10. Distribusi Frekuensi Kompetensi	69
11. Uji Validitas	71
12. Uji Reabilitas	72
13. Uji Normalitas Residual	73
14. Uji Multikolinearitas	74
15. Uji Heterokedastisitas	74
16. Uji F	75
17. Koefisien Determinasi	76
18. Koefisien Regresi Berganda	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Format Kuesioner.....	85
2. Uji Validitas Dan Reliabilitas Pilot Test.....	89
3. Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian	94
4. Uji Asumsi Klasik Pengujian Model	100
5. Surat izin Penelitian	102

LAMPIRAN I

PILOT TEST UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL INDEPENDENSI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	43.5
	Excluded(a)	39	56.5
	Total	69	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.797	.835	14

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q1	4.5333	.68145	30
Q2	4.3667	.55605	30
Q3	4.4333	.50401	30
Q4	4.5333	.50742	30
Q5	4.5333	.50742	30
Q6	3.8333	1.14721	30
Q7	4.2000	.80516	30
Q8	4.3000	.70221	30
Q9	4.3667	.61495	30
Q10	4.4000	.49827	30
Q11	4.2000	.92476	30
Q12	4.0000	1.05045	30
Q13	4.1000	.88474	30
Q14	4.2667	.69149	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	55.5333	27.499	.314	.586	.793
Q2	55.7000	26.079	.659	.864	.770
Q3	55.6333	26.930	.564	.886	.778
Q4	55.5333	26.947	.556	.728	.778
Q5	55.5333	27.154	.515	.834	.781
Q6	56.2333	24.392	.391	.527	.793
Q7	55.8667	27.085	.402	.692	.795
Q8	55.7667	25.771	.543	.733	.774
Q9	55.7000	26.631	.492	.747	.780
Q10	55.6667	26.368	.687	.870	.771
Q11	55.8667	25.430	.413	.751	.786
Q12	56.0667	25.513	.521	.742	.797
Q13	55.9667	25.620	.417	.689	.785
Q14	55.8000	28.028	.372	.477	.799

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
60.0667	30.133	5.48938	14

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KOMPETENSI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	43.5
	Excluded(a)	39	56.5
	Total	69	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.913	.920	18

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q1	4.5000	.50855	30
Q2	4.1667	.91287	30
Q3	4.5333	.50742	30
Q4	4.3667	.61495	30
Q5	4.5333	.81931	30
Q6	4.4333	.50401	30
Q7	4.2667	.63968	30
Q8	4.4000	.56324	30
Q9	4.4333	.50401	30
Q10	4.4000	.72397	30
Q11	4.3667	.55605	30
Q12	4.4333	.56832	30
Q13	4.3000	.53498	30
Q14	4.4333	.62606	30
Q15	4.3667	.55605	30
Q16	4.3333	.54667	30
Q17	4.3333	.54667	30
Q18	4.4667	.57135	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	74.5667	44.530	.574	.	.909
Q2	74.9000	41.403	.549	.	.912
Q3	74.5333	43.844	.682	.	.906
Q4	74.7000	42.976	.661	.	.906
Q5	74.5333	42.809	.485	.	.913
Q6	74.6333	44.447	.593	.	.908
Q7	74.8000	43.752	.535	.	.910
Q8	74.6667	44.713	.485	.	.911
Q9	74.6333	43.895	.679	.	.906
Q10	74.6667	43.540	.484	.	.912
Q11	74.7000	43.045	.731	.	.905
Q12	74.6333	43.275	.680	.	.906
Q13	74.7667	43.082	.757	.	.904
Q14	74.6333	42.516	.708	.	.905
Q15	74.7000	44.769	.485	.	.911
Q16	74.7333	46.133	.313	.	.915
Q17	74.7333	43.582	.666	.	.906
Q18	74.6000	43.352	.665	.	.906

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
79.0667	48.685	6.97747	18

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN LKPD

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	43.5
	Excluded(a)	39	56.5
	Total	69	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.740	.727	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Q1	4.4667	.57135	30
Q2	4.4000	.62146	30
Q3	4.3333	.60648	30
Q4	4.0333	1.06620	30
Q5	4.1667	1.05318	30
Q6	4.4000	.62146	30
Q7	4.0000	1.11417	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	25.3333	11.816	.357	.321	.730
Q2	25.4000	11.490	.396	.321	.723
Q3	25.4667	12.120	.375	.420	.746
Q4	25.7667	8.116	.707	.760	.636
Q5	25.6333	8.447	.652	.749	.654
Q6	25.4000	12.041	.421	.520	.745
Q7	25.8000	8.648	.558	.378	.685

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29.8000	13.545	3.68033	7

LAMPIRAN II

DATA PENELITIAN UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL INDEPENDENSI

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	67	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	67	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.830	.876	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	53.7015	34.091	.575	.706	.816
Q2	53.8060	33.613	.628	.748	.813
Q3	53.8060	33.916	.615	.752	.815
Q4	53.8060	33.886	.580	.691	.816
Q5	53.8507	34.432	.534	.598	.819
Q6	54.4478	30.645	.483	.545	.820
Q7	53.9851	35.560	.325	.416	.827
Q8	53.9254	34.222	.528	.675	.818
Q9	53.9851	32.651	.574	.575	.812
Q10	53.9104	33.477	.611	.580	.813
Q11	54.3433	30.289	.492	.584	.820
Q12	54.4627	32.343	.319	.616	.836
Q13	54.6269	29.389	.496	.502	.823
Q14	54.2537	32.798	.442	.693	.821

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
58.2239	37.722	6.14181	14

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KOMPETENSI

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	67	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	67	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.843	.848	18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	73.4478	23.615	.541	.	.830
Q2	73.4328	23.916	.509	.	.832
Q3	73.3134	24.218	.551	.	.831
Q4	73.3134	24.188	.520	.	.832
Q5	73.3134	24.188	.520	.	.832
Q6	73.4478	24.493	.366	.	.840
Q7	73.4627	24.071	.554	.	.831
Q8	73.3731	23.783	.518	.	.832
Q9	73.4627	24.707	.424	.	.836
Q10	73.3134	24.582	.414	.	.837
Q11	73.6119	25.090	.240	.	.848
Q12	73.5373	24.525	.545	.	.832
Q13	73.5224	24.253	.514	.	.832
Q14	73.5373	24.646	.476	.	.834
Q15	73.4776	25.556	.283	.	.842
Q16	73.5224	25.071	.306	.	.842
Q17	73.4925	25.405	.296	.	.842
Q18	73.3582	24.173	.445	.	.836

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
77.7612	27.185	5.21388	18

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN LKPD

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	67	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	67	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.644	.647	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	25.3134	7.218	.542	.643	.672
Q2	25.5672	6.886	.422	.432	.725
Q3	25.4030	6.275	.365	.302	.607
Q4	25.6567	5.411	.452	.549	.574
Q5	25.6119	5.059	.664	.686	.502
Q6	25.4627	6.131	.411	.198	.594
Q7	25.4627	5.010	.605	.569	.517

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29.7463	7.707	2.77622	7

LAMPIRAN III

UJI NORMALITAS RESIDUAL

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		67
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.53333652
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.054
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.648
Asymp. Sig. (2-tailed)		.795

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients(a)

Model	Collinearity Statistics	
	VIF	Tolerance
1 (Constant)		
X1	.943	1.060
X2	.943	1.060

a Dependent Variable: Y

a. Adjusted R Square

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409(a)	.167	.141	2.57262

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

b. Uji Model Atau uji F

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	85.112	2	42.556	6.430	.003(a)
	Residual	423.574	64	6.618		
	Total	508.687	66			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

UJI HETEROKEDASTIS

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: ABSUT

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.262(a)	.068	.039	1.49740

a Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.540	2	5.270	2.350	.104(a)
	Residual	143.500	64	2.242		
	Total	154.041	66			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: ABSUT

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	8.260	2.975		2.776	.007
	X1	-.039	.031	-.158	-1.274	.207
	X2	-.051	.036	-.174	-1.399	.167

a Dependent Variable: ABSUT

LAMPIRAN IV

UJI REGRESI BERGANDA

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t		Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1 (Constant)	12.138	5.112		2.375		.021
X1	.117	.053	.259	2.208		.031
X2	.139	.063	.260	2.217		.030

a. Dependent Variable: Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi dan pelaporan keuangan suatu unit pemerintahan, menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi, politik dan sosial untuk memperlihatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban aparatur pemerintahan atas tugas yang diberikan kepadanya. Informasi keuangan tersebut juga berguna untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus diperiksa oleh auditor yang independen. Kontribusi audit laporan keuangan adalah untuk menyajikan akuntabilitas, selama auditor memberikan pendapat yang independen, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil yang wajar dan apakah informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kontribusi audit pada sektor publik digunakan untuk melihat akuntabilitas pemerintah secara riil, menilai integritas, kinerja dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah.

Banyaknya kasus perekrutan laporan keuangan di suatu unit entitas menurunkan kepercayaan pemakai laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan audit atas laporan keuangan yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor

independen terhadap laporan keuangan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut yaitu menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan perusahaan dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Audit atas laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak pemakai untuk menilai suatu entitas dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan entitas tersebut.

Pada era transparan dan terbuka saat ini, dalam menjalankan tugasnya seorang auditor dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya, dengan mendasarkan pada kode etik dan standar profesi. Kualitas laporan hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundangan (SPKN, 2007).

Untuk memperoleh kualitas laporan hasil pemeriksaan yang baik maka dibutuhkan suatu standar. Di Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara di suatu lembaga atau entitas telah ditetapkan suatu standar yang disebut dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Untuk dapat mengukur Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan maka seorang auditor harus memahami standar pelaporan pemeriksaan keuangan yang terdapat dalam SPKN.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan

pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif.

Dalam melaporkan hasil pemeriksaannya, pemeriksa bertanggung jawab untuk mengungkapkan semua hal yang material atau signifikan yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan kesalahpahaman para pengguna laporan hasil pemeriksaan, kesalahan dalam penyajian hasilnya, atau menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sektor publik, pemeriksaan terhadap laporan keuangan biasanya dilakukan oleh BPK atau oleh akuntan publik atas penunjukan BPK, yang dalam rangka pelaksanaan pemeriksaannya mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan standar yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 yang menjadi pedoman oleh BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukannya dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan keuangan negara.

Dalam pernyataan standar umum pertama yang terdapat dalam SPKN mengamanatkan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan pernyataan standar pemeriksaan tersebut maka semua organisasi pemeriksa

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit.

Kompetensi yang dimiliki oleh akuntan pemeriksa (auditor) akan berhubungan dengan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkannya karena kompetensi mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan tugas pemeriksaan seorang auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai untuk mengambil kesimpulan dan keputusan dari tugas pemeriksaan yang dilakukannya. Dengan mempunyai pengetahuan yang memadai maka auditor tidak akan salah atau pun ragu dalam mengambil kesimpulan dan keputusan terhadap hasil temuan pada saat melakukan pemeriksaan.

Sedangkan Pengalaman kerja dalam mengaudit laporan keuangan diharapkan akan menambah pengetahuan auditor dalam bidang auditing yang berkaitan dengan kompetensi sehingga akan berpengaruh pula pada kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tersebut. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan mempermudah auditor dalam mendeteksi adanya kekeliruan atau kesalahan dalam pemeriksaan. Selain itu pengalaman kerja dapat mendorong auditor untuk meminimalisasi kesalahan dan menyelesaikan tugas pemeriksaan tepat pada waktunya. Pada penelitian Ananing (2006:54) menyatakan bahwa “pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja sebagai auditor berpengaruh positif terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing”.

Kompetensi juga mensyaratkan akuntan publik harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Akuntan publik harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi sehingga akuntan publik akan memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan.

Independensi merupakan pernyataan standar umum kedua dalam SPKN yang mengamanatkan “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Independensi merupakan komponen dari pribadi yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti

akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur kepada seluruh pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

Organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Hubungannya dengan kualitas laporan hasil pemeriksaan adalah dengan dipertahankannya independensi oleh auditor maka laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan akan baik karena pendapat dan simpulan yang diberikan oleh auditor telah sesuai dengan apa yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Apabila auditor dinilai tidak independen dalam melaksanakan tugas pemeriksaan maka pendapat yang diberikannya tidak akan dipercaya oleh pihak lain sebagai pengguna informasi keuangan.

Pada penelitian Rizal (2008) menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan berpengaruh dengan kualitas hasil pemeriksaan. Sama halnya pada penelitian Nova Siska (2008) yang meneliti pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit dan hasilnya kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan dan

positif terhadap kualitas audit. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel bebas yaitu kompetensi dan independensi, pada variabel kompetensi peneliti menggunakan dua dimensi pengukuran yaitu pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada periode belakangan ini, BPK sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sering kali diragukan mengenai kompetensi, independensi dalam melakukan pemeriksaan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya bahwa BPK sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan juga memberikan jasa pelatihan dan konsultasi pada pegawai instansi/lembaga pemerintah dalam hal menyusun laporan keuangan.

Kepercayaan yang besar diberikan pemakai laporan keuangan terhadap jasa yang diberikan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Pekerjaan ini mengharuskan auditor memperhatikan kualitas hasil pemeriksaannya agar para pemakai tidak salah apabila laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Fenomena lainnya adalah semenjak diberlakukannya otonomi daerah, daerah diwajibkan untuk membuat laporan keuangannya sendiri. Maka pemerintah daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangannya. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan segala macam cara, seperti menyuap dan memberikan fasilitas-fasilitas yang tidak wajar kepada auditor yang

memeriksa laporan keuangan mereka. Hal itu menyebabkan adanya keraguan pada masyarakat yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

Kasus suap yang terjadi pada Endang Hermawan yang merupakan auditor BPK Jawa Barat Wilayah III yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum pejabat Pemkot Bekasi, yang mana kasus ini terjadi karena adanya indikasi laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah hasil audit yang sebenarnya tetapi merupakan hasil rekayasa dari auditor yang telah menerima suap dari oknum pegawai Pemkot Bekasi (<http://www.tempointeraktif.com>). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurang memadainya kompetensi dan independensi yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan tugas pemeriksaan yang mengakibatkan kualitas hasil pemeriksaan menjadi tidak baik.

Oleh karena hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK atau auditor independen yang ditunjuk oleh BPK akan menjadi bahan pertimbangan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berkepentingan baik legislatif maupun eksekutif untuk dijadikan dasar dalam menetapkan keputusan-keputusan di masa kini maupun masa yang akan datang maka penelitian ini penting dilakukan. Hal tersebutlah yang menjadi motivasi peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah:

1. Sejauhmana independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sejauhmana kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Sejauhmana standar profesi berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Sejauhmana latar belakang pendidikan auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Sejauhmana pernyataan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Sejauhmana kode etik berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Sejauhmana pengungkapan informasi dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Sejauhmana perencanaan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Maka dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengaruh independensi, dan kompetensi terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada auditor BPK di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi Masalah, maka dirumuskan masalah:

1. Sejauhmana independensi berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh independensi terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan penulis serta dapat mengetahui bagaimana pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Memberikan kontribusi bagi Ikatan profesi dan Lembaga Pemeriksaan mengenai peningkatan kualitas laporan hasil pemeriksaan.
3. Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan, dalam kaitannya dengan pengembangan pembelajaran yang berkaitan independensi dan kompetensi dengan melalui pendidikan profesi akuntan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

Untuk memperoleh kualitas laporan hasil pemeriksaan yang baik maka dibutuhkan suatu standar. Di Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara di suatu lembaga atau entitas telah ditetapkan suatu standar yang disebut dengan Standar Pemeriksaaan Keuangan Negara (SPKN).

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Pemeriksaan akan menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pekerjaannya dengan cara ini dan melaporkannya sesuai dengan standar Pemeriksaan maka hasil pekerjaan tersebut akan dapat mendukung serta pengambilan keputusan Pemerintah. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik.

Standar pemeriksaan keuangan negara dimaksudkan untuk dapat dijadikan patokan bagi para pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan

atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara agar dapat memelihara kompetensi, integritas, objektivitas dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan yang dilaksanakannya.

Menurut SPKN (2007) Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut seorang auditor wajib melaporkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Bagi auditor sangatlah penting untuk menjaga kualitas laporan hasil pemeriksaan supaya tidak menyesatkan para pemakainya dalam mengambil keputusan dan agar menjaga kredibilitas dan reputasinya. Kredibilitas sangat diperlukan oleh semua organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan yang diandalkan oleh para pejabat entitas dan pengguna hasil pemeriksaan lainnya dalam mengambil keputusan, dan merupakan hal yang diharapkan oleh publik dari informasi yang disajikan oleh pemeriksa.

Kualitas laporan hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut

dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundangan (SPKN, 2007).

Pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itulah Standar Pemeriksaan memuat konsep akuntabilitas yang merupakan landasan dalam pelayanan kepentingan publik.

Pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi pemeriksa. Dalam menghadapi tekanan dan atau konflik tersebut, pemeriksa harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada publik.

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya

dengan derajat integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut diluar pelaksanaan pemeriksaan kecuali ditentukan lain.

Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. Integritas mensyaratkan pemeriksa untuk memperhatikan jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas juga mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip obyektivitas dan independensi.

Pemeriksa harus obyektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental (*independent in fact*) dan independensi dalam penampilan perilaku (*independent in appearance*) pada saat melaksanakan pemeriksaan. Bersikap obyektif merupakan cara berpikir yang tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan.

Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Untuk mempertahankan obyektivitas dan independensi maka diperlukan penilaian secara terus-menerus terhadap hubungan pemeriksa dengan entitas yang diperiksa.

Pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya. Pemeriksa harus mempertahankan integritas dan obyektivitas pada saat melaksanakan pemeriksaan untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik. Dalam melaporkan hasil pemeriksaannya, pemeriksa bertanggung jawab untuk mengungkapkan semua hal yang material atau signifikan yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan kesalahpahaman para pengguna laporan hasil pemeriksaan, kesalahan dalam penyajian hasilnya, atau menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan Standar Pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka membantu pihak manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya memahami tujuan, jangka waktu dan

data yang diperlukan dalam pemeriksaan, pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait selama tahap perencanaan pemeriksaan.

Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: (1) independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan, (2) pertimbangan profesional (*professional judgment*) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, (3) pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan (4) *peer-review* yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan Standar Pemeriksaan.

Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan

- a. Laporan audit harus menyertakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

Selain empat standar di atas, standar pelaporan pemeriksaan keuangan menambahkan standar pelaporan tambahan sebagai berikut.

- a. Laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.
- b. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.
- c. Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

- d. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.
- e. Informasi rahasia yang dilarang di ungkapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut.
- f. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengukur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ulum (2009 : 92) Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja pemeriksaan ditentukan oleh keahlian, independensi serta integritas moral/kejujuran para pemeriksa dalam menjalankan pekerjaanya.

Agar tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah meningkat terhadap kualitas hasil pemeriksaan maka ditetapkan Aturan Pengawasan Fungsional Pemerintahan (APFP) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pelaku Pemeriksa Sesuai Dengan Tuntutan Organisasi
 - a. Pemeriksa wajib menaati segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
 - b. Pemeriksa harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya
 - c. Pemeriksa harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya.
 - d. Pemeriksa harus memiliki integritas yang tinggi.
 - e. Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mempertahankan objektivitasnya.
 - f. Pemeriksa wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia objek yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa perundang-undangan.
2. Perilaku pemeriksa dalam berinteraksi dengan sesama pemeriksa
 - a. Pemeriksa wajib untuk menggalang kerja sama yang sehat dengan sesama pemeriksa.

- b. Pemeriksa harus saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku sesama pemeriksa.
 - c. Pemeriksa harus memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pemeriksa.
3. Perilaku pemeriksa dalam berinteraksi dengan pihak yang diperiksa
- a. Pemeriksa senantiasa harus menjaga penampilannya sesuai dengan tugas pemeriksa.
 - b. Pemeriksa harus mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diperiksa.
 - c. Pemeriksa harus mampu menciptakan iklim yang baik dengan pihak yang diperiksa
 - d. Pemeriksa wajib menggalang kerja sama yang sehat dengan pihak yang diperiksa.

Sikap profesional akuntan publik dalam menyajikan kualitas hasil pemeriksaan merupakan komponen yang berkaitan. Seorang akuntan publik dengan tingkat profesional yang tinggi akan memiliki kemampuan dan keahlian teknis, serta menggunakan kemahirannya dalam menyajikan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Akuntan publik memiliki kemampuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu independensi, integrasi dan obyektifitasnya, khususnya dengan pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan kualitas laporan hasil pemeriksaan.

Untuk menjaga kualitas laporan hasil pemeriksaan dalam pernyataan Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: a). Bahwa

setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. b). Jika terlihat sebagai auditor, setiap anggota harus mempertahankan sikap independensinya. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu. c). Jika ada masalah tertentu yang belum diatur dalam standar etika profesi atau hukum negara, setiap anggota harus tetap mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. d). Auditor harus selalu mempertahankan sikap independen *in fact* dan *in appearance* selama melaksanakan tugas audit. e). Dalam hal seorang anggota tidak bisa mempertahankan sikap di atas yang relevan dengan profesinya, ia harus menolak untuk menerima atau mengundurkan diri dari tugas yang bersangkutan.

2. Independensi

Definisi independensi dalam *The CPA Handbook* menurut E.B. Wilcox adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun (Mautz dan Sharaf, 1993, dalam Nizarul, *et.al* 2007:8).

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Keberadaan akuntan publik sebagai suatu profesi tidak dapat dipisahkan dari karakteristik independensinya. Akuntan publik selalu dianggap orang yang harus independen. Tanpa adanya independensi, akuntan publik tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan akuntan publik sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari akuntan publik. Masyarakat akan meminta pihak lain yang dianggap independen untuk menggantikan fungsi akuntan publik. Atau dengan kata lain, keberadaan akuntan publik ditentukan oleh independensinya. Keeratan hubungan akuntan publik dengan independensi ini dapat ditinjau dari posisi penting kata independensi dalam berbagai literature pengauditan. Dalam beberapa definisi pengauditan yang dikemukakan oleh pakar pengauditan terkandung makna independensi, baik secara tersurat maupun tersirat. Salah satu diantaranya adalah definisi menurut Mulyadi (2002, dalam Ayu 2009:30) yaitu :

“Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik 1999 seksi 220 PSA

No. 04 alinea 2, dijelaskan bahwa:

“Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.”

Kode Etik Akuntan tahun 1994 menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Auditor harus menjaga integritasnya karena mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. Integritas mensyaratkan pemeriksa untuk memperhatikan jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip obyektivitas dan independensi.

Integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Integritas tidak hanya berupa kejujuran tetapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini ditunjukkan oleh auditor ketika memunculkan keunggulan personal ketika memberikan layanan

professional kepada instansi tempat auditor bekerja dan kepada auditannya.

Berkaitan dengan hal itu terdapat 4 hal yang mengganggu independensi akuntan publik, yaitu : (1.) Akuntan publik memiliki *mutual* atau *conflicting interest* dengan klien, (2.) Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri, (3.) Berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan (4.) Bertindak sebagai penasihat (*advocate*) dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensinya jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya.

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

Pemeriksa harus menghindari dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang obyektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Untuk menjaga independensi auditor harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga auditor harus:

1. bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggung jawabnya,
2. tidak memihak kepada siapa pun,
3. tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit.

Menurut Abdul Halim (2001 dalam Ratnadi 2006:6) ada tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut. (1) *Independence in fact* (independensi senyatanya) yakni auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi. (2) *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. (3) *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian) yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Auditor yang obyektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan. Dalam mengambil keputusan atau tindakan, ia tidak boleh bertindak atas dasar prasangka atau bias, pertentangan kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain. Obyektivitas ini dipraktikkan ketika auditor mengambil keputusan-keputusan dalam kegiatan auditnya. Auditor yang obyektif adalah auditor yang mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia, dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan pendapat atau prasangka

pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain. (Rahmadi, *et.al* 2007:62)

Wati dan Subroto (2003, dalam Nizarul, *et.al* 2007:9) telah melakukan penelitian mengenai independensi auditor di Indonesia. Penelitian ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor yaitu (1) ikatan keputusan keuangan dan hubungan usaha dengan klien; (2) persaingan antar KAP; (3) pemberian jasa lain selain jasa audit; (4) lama penugasan audit; (5) besar kantor akuntan; dan (6) besarnya *audit fee*. Responden yang dipilih meliputi direktur keuangan perusahaan yang telah *go public*, *partner* KAP, pejabat kredit bank dan lembaga keuangan non bank, dan Bapepam.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nizarul, *et.al* (2007:17) Hasil pengujian dengan regresi berganda menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dimana hal ini telah sesuai dengan hipotesis ketiga bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Eunike (2007:91) Adapun untuk variabel independensi yang diproksikan dalam lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah rekan audit dan jasa non audit yang diberikan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, yakni dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,063 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel independensi maka akan

meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor sebesar 0,063 satuan.

3. Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Buyung syafei (2007) menyatakan Kompeten adalah ketrampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Kompeten harus dibedakan dengan kompetensi, walaupun dalam pemakaian umum istilah ini digunakan dapat dipertukarkan. Upaya awal untuk menentukan kualitas dari manajer yang efektif didasarkan pada sejumlah sifat-sifat kepribadian dan ketrampilan manajer yang ideal. Ini adalah suatu pendekatan model input, yang fokus pada ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Ketrampilan-ketrampilan ini adalah kompetensi dan mencerminkan kemampuan potensial untuk melakukan sesuatu.

Lee dan Stone (1995, dalam Eunike 2007:26), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat

digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus (1986, dalam Eunike 2007:26), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seseorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “ mengetahui sesuatu “ ke “ mengetahui bagaimana “. Seperti misalnya dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pernyataan yang bersifat intuitif.

Sedangkan Trotter (1986, dalam Eunike 2007:26) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Sri Lastanti (2005, dalam Eunike 2007:27) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998, dalam Nizarul, *et.al* 2007: 6) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

Adapun kompetensi menurut De Angelo (1981, dalam Eunike 2007:27) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih mendetail berikut ini :

a. Kompetensi Auditor Individual.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990 dalam Eunike 2007:28) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

b. Kompetensi Audit Tim.

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor yunior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini

dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003 dalam Eunike 2007:28). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP.

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992 Eunike 2007:28) diukur dari jumlah klien dan persentase dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Dan berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh De Angelo (1981), kompetensi diproksikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman.

a. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga

dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard et.al, dalam Eunike, 2007:30).

Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, dalam Eunike, 2007:30), yaitu : (1.) Pengetahuan pengauditan umum, (2.) Pengetahuan area fungsional, (3.) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4.) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5.) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian besar dari pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor bias mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemeriksa memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan tersebut dan harus menyelenggarakan dokumentasi tentang pendidikan yang sudah diselesaikan. Pendidikan profesional berkelanjutan dimaksud dapat mencakup topik, seperti: perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian atas pengendalian intern,

prinsip manajemen atau supervisi, pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, statistik, disain evaluasi, dan analisis data. Pendidikan dimaksud dapat juga mencakup topik tentang pekerjaan pemeriksaan di lapangan, seperti administrasi negara, struktur dan kebijakan pemerintah, teknik industri, keuangan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi informasi. Tenaga ahli intern dan ekstern yang membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus memiliki kualifikasi atau sertifikasi yang diperlukan dan berkewajiban untuk memelihara kompetensi profesional dalam bidang keahlian mereka, tetapi tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan di atas. Akan tetapi, pemeriksa yang menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli intern dan ekstern harus yakin bahwa tenaga ahli tersebut memenuhi kualifikasi dalam bidang keahlian mereka dan harus mendokumentasikan keyakinan tersebut (SPKN 2007).

Persyaratan kemampuan atau keahlian dalam (SPKN 2007):

- 1) Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan.
- 2) Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan).
- 3) Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.

4) Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan, misalnya:

- a) Apabila pemeriksaan dimaksud memerlukan penggunaan sampling statistik, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keterampilan di bidang sampling statistik.
- b) Apabila pemeriksaan memerlukan *review* yang luas terhadap suatu sistem informasi, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan atas teknologi informasi.
- c) Apabila pemeriksaan meliputi *review* atas data teknik yang rumit, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- d) Apabila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang sangat khusus seperti penggunaan instrumen pengukuran yang sangat rumit, atau pengujian analisis statistik, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.

Dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal ditambah dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik audit dan menjalani pelatihan teknis yang cukup. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman yang memungkinkan seorang anggota untuk memerlukan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Setiap anggota bertanggung jawab

apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung jawab yang harus dipenuhinya.

b. Pengalaman Kerja

Knoers & Haditono (1999, dalam Ananing 2006:25) Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek.

Menurut Payama (2005, dalam Ananing 2006:26) Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja.

Meidiawati (2001, dalam Ananing 2006:31) Pengalaman merupakan atribut yang penting yang dimiliki auditor, terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang tidak lazim/wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Hadiwiryono (2002, dalam Ananing 2006:31) Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup dalam menjalankan tugasnya. Kenyataan menunjukkan semakin lama seseorang bekerja maka, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja berarti semakin sedikit pengalaman yang diperolehnya. Pengalaman bekerja memberikan keahlian dan ketrampilan kerja yang cukup namun sebaliknya, keterbatasan pengalaman kerja mengakibatkan tingkat ketrampilan dan keahlian yang dimiliki semakin rendah. Kebiasaan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sejenis merupakan sarana positif untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja.

Dian indri purnamasari, (2005, dalam Ananing 2006:25) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya; 1). Mendeteksi kesalahan, 2). Memahami kesalahan dan 3) Mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci, lengkap dan *sophisticated* dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman.

Pengalaman mempunyai hubungan yang erat dengan keahlian auditor, pencapaian keahlian seorang auditor selain berasal dari pendidikan formalnya juga diperluas lagi dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik audit. Buku-buku psikologi tentang keahlian menarik dua kesimpulan umum, Asthon (1991, dalam Ananing 2006:30) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) pemilikan pengetahuan khusus adalah penentu keahlian, (2) pengetahuan seseorang ahli diperoleh melalui pengalaman kerja selama bertahun-tahun. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian keahlian seorang auditor harus mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang audit, pengetahuan ini biasa didapat dari pendidikan formalnya yang diperluas dan ditambah antara lain melalui pelatihan auditor dan pengalaman pengalaman dalam praktek audit.

Abdol dan Wright (dalam Ananing, 2006: 35) memberikan bukti empiris bahwa dampak auditor akan signifikan ketika kompleksitas tugas dipertimbangkan. Mereka melakukan penelitian terhadap auditor berpengalaman (yang telah mencapai tingkatan staff, yang membutuhkan keahlian normatif) dan auditor yang kurang berpengalaman (lebih rendah dari tingkatan staff atau mahasiswa auditing) ketika mereka dihadapkan pada tugas yang terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini meberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan berpengaruh signifikan ketika tugas yang dilakukan semakin kompleks. Seorang yang memiliki pengetahuan tentang kompleksitas tugas akan lebih ahli dalam

melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, sehingga memperkecil tingkat kesalahan, kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran dalam melaksanakan tugas.

Ken.t.Trotman & Arnold wright (1996, dalam Ananing 2006: 35). Tentang dampak pengalaman dalam kompleksitas tugas, tugas spesifik dan gaya pengambilan keputusan, memberikan kesimpulan bahwa kompleksitas tugas merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dalam pertambahan pengalaman. Auditor junior biasanya memperoleh pengetahuan dan pengalamannya terbatas dari buku teks sedangkan auditor senior mengembangkan pengetahuan dan pengalaman lewat pelatihan dan pengembangan lebih lanjut dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

Meidawati (2001, dalam Ananing 2006:32) Pengalaman merupakan atribut yang penting yang dimiliki auditor, terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan yang tidak lazim/wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Penelitian tentang pengalaman akuntan pernah dilakukan oleh Sri Sularso dan Ainun Na'im. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh pengalaman akuntan dalam mendeteksi kekeliruan. Penelitian dilakukan terhadap 35 akuntan pemeriksa yang berpengalaman dari Kantor Akuntan Publik di Solo dan Jakarta serta 35 Mahasiswa akuntansi S1 Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Surakarta sebagai pengganti akuntan pemeriksa yang belum berpengalaman. Salah satu kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan banyaknya tahun pengalaman untuk akuntan pemeriksa sebagai satu-satunya ukuran keahlian adalah kurang tepat. (Sularso dan Na'im 1999 dalam Christiawan 2002:85).

Penelitian yang hampir sama tentang pengalaman auditor dilakukan oleh Putri Noviyani. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan auditor tentang kekeliruan. Penelitian dilakukan terhadap 39 auditor di Kantor Akuntan Publik di Jawa yang memiliki posisi partner, supervisor dan asisten auditor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman akan berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis kekeliruan.

Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa program pelatihan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam peningkatan keahlian auditor. (Noviyani 2002 dalam Christiawan 2002:85). Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan yang ada di perusahaan yang menjadi kliennya. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pelatihan yang dilakukan oleh auditor akan meningkatkan keahlian mereka untuk melakukan audit. Keahlian audit dan kemampuan untuk mengetahui kekeliruan merupakan salah satu bagian dari kompetensi auditor.

Ashton (1991, dalam Nizarul 2007:6) menunjukkan bahwa dalam literatur psikologi, pengetahuan spesifik dan lama pengalaman bekerja

sebagai faktor penting untuk meningkatkan kompetensi. Ashton juga menjelaskan bahwa ukuran kompetensi tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain di selain pengalaman.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa persyaratan yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang biasanya diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai auditor independen.

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan kualitas laporan hasil pemeriksaan dan kualitas audit telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Duky Firmansyah (2005) menyatakan sikap profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sikap profesionalisme berkaitan dengan kualitas dan kompetensi seseorang dengan komitmen dan keahlian, sehingga sikap profesionalisme yang dimiliki auditor akan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Citra Liza (2009) yang menyatakan sikap profesionalisme dan kelayakan bukti audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan audit.

Penelitian yang dilakukan Iyos dan Arifin mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman Bekerja, kecakapan profesional, independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Pengalaman kerja dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2008) mengenai pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan professional, pendidikan berkelanjutan dan independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nizarul, *et.al* (2007), Eunike (2007) dan Nova Siska (2008) mengenai pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit, menyatakan bahwa independensi dan kompetensi berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan Dwi Ananing (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing, menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas auditor. Selanjutnya Eka Desyanti (2005) dalam penelitiannya menyatakan independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja pengawas intern berpengaruh signifikan terhadap efektifitas penerapan struktur intern entitas yang diaudit. Gusti (2008) dalam penelitiannya menyatakan adanya hubungan skeptisme profesional auditor dan situasi audit, etika, pengalaman serta keahlian dengan ketepatan pemberian opini audit oleh akuntan publik. Anike Putri (2009) meneliti pengaruh akuntabilitas

dan pengalaman auditor terhadap kualitas hasil kerja auditor hasilnya akuntabilitas dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

Independensi adalah sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bahan bukti yang ada dalam suatu proses pemeriksaan sehingga akan menciptakan suatu kualitas laporan hasil pemeriksaan yang baik.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan darigangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Independensi merupakan aspek yang penting bagi seorang auditor. Meskipun auditor memiliki kemampuan teknik yang cukup dalam bidang audit, tetapi profesi ini juga juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Independensi auditor merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat terhadap auditor dan merupakan faktor yang sangat penting guna menilai kualitas jasa audit untuk diakui sebagai seorang yang independen.

Kualitas laporan hasil pemeriksaan suatu laporan keuangan akan sangat bergantung pada independensi auditor, dimana seorang auditor

akan memberikan pendapat mengenai wajar atau tidakkah laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas atau organisasi berdasarkan tugas pemeriksaan yang dilakukannya. Apabila seorang auditor tidak independen dalam melakukan tugas pemeriksaan maka pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diperiksa tidak akan cukup memberikan informasi yang berguna bagi pihak intern dan ekstern suatu entitas atau organisasi.

Auditor yang independen dalam melaksanakan tugasnya akan terbebas dari sikap mental, penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Auditor yang independen dapat memberikan nilai dalam meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan, karena informasi yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaannya lengkap, akurat dan objektif yaitu informasi yang sesuai dengan fakta, temuan dan bukti sebenarnya.

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa independensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kualitas hasil pemeriksaan, misalnya penelitian Rizal (2008), yang melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh, latar belakang pendidikan, kecakapan professional, pendidikan berkelanjutan dan independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan oleh seorang auditor untuk dapat menyelesaikan tugas pemeriksaan. Seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Kompetensi merupakan aspek-aspek pribadi yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kinerja superior.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menyebutkan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit.

Hubungannya dengan kualitas laporan hasil pemeriksaan adalah dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka ia akan dapat menyelesaikan tugas pemeriksaannya dengan mudah cepat dan terhindar

dari kesalahan-kesalahan yang bersifat materil yang dapat berpengaruh pada kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

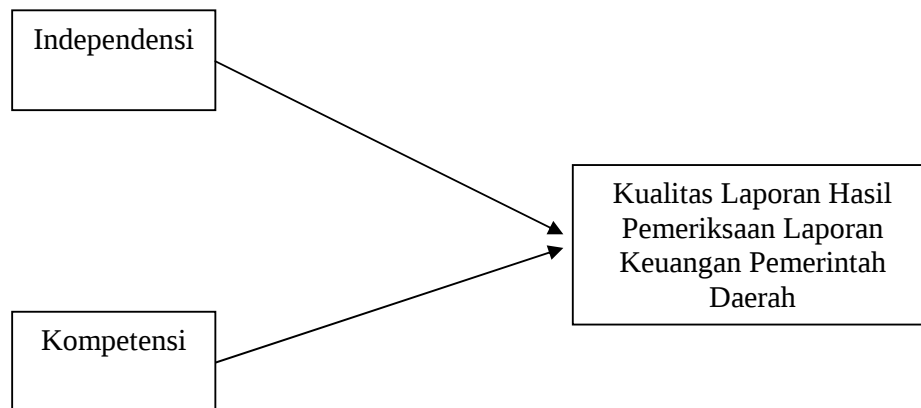
Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iyos dan Arifin yang menyatakan pengalaman kerja yang merupakan bagian dari kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Eunike dan M. Nizarul, et al (2007) yang melakukan penelitian pada KAP menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan independensi dan kompetensi terhadap kualitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kualitas laporan hasil pemeriksaan yang memadai maka tidak terlepas dari independensi dan kompetensi auditor pemeriksa laporan keuangan. Independensi, dan kompetensi merupakan faktor-faktor yang harus dimiliki dan dijaga oleh seorang auditor agar hasil pemeriksaannya nanti dapat diandalkan dan dipercaya dalam hal untuk pengambilan keputusan dan bahan evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada periode yang akan datang. Hubungan antara independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Independensi dan Kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar.
2. Independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar.
3. Kompetensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPK-RI Perwakilan Wilayah Sumbar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Independensi auditor perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar dalam melaksanakan tugasnya auditor tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada kepentingan manapun. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan akuntan publik

sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari akuntan publik. Independensi auditor merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat terhadap auditor dan merupakan faktor yang sangat penting guna menilai kualitas jasa audit.

2. Untuk mencapai kualitas laporan hasil pemeriksaan yang baik maka auditor harus meningkatkan kompetensi yang mereka miliki baik melalui pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi. Peningkatan pengalaman kerja dalam profesinya sebagai auditor dan selalu mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan. Jadi dengan hal ini maka audit yang auditor lakukan akan terbebas dari kekeliruan dan dapat meminimalisasi kesalahan demi mencapai kualitas hasil pemeriksaan yang baik karena telah dituang dengan kompetensi yang mereka miliki.
3. Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel-variabel lain terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan. Dalam hal ini, variabel-variabel tersebut adalah latar belakang pendidikan, pengendalian mutu, perencanaan dan program kerja pemeriksaan, bukti yang cukup, kecukupan waktu, loyalitas dan pernyataan pendapat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indikator pernyataan kuisisioner agar penelitian lebih mampu mengungkap masalah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan memperluas sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anike Putri,. 2009. *Pengaruh Akuntabilitas dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor*. Skripsi FE UNP. Padang
- Alvin Arens A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Erlangga: Jakarta.
- Baharuddin Aritonang,et al. 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
- Buyung Ahmad Syafei. 2007. *Kompeten dan Kompetensi*. Jurnal WordPress
- Desi Hamidarwati Purba. 2009. Analisis Pengaruh Independensi Auditor, Etika Auditor Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor di KAP Surakarta. Skripsi FE Muhammadiyah. Surakarta
- Dwi Ananing Tyas Asih. 2006. *Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor Dalam Bidang Auditing*. Sripsi FE UII. Yogyakarta
- Eka Desyanti & Dwi Ratnadi. 2006. *Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional,Dan Pengalaman Kerja Pengawas Intern Terhadap Efektivitas Penerapan Struktur Pengendalian Intern Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Badung*. FE Udayana. Bali
- Eunike Christina Elfarini. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi FE UNS. Semarang
- Hian Ayu Oceani Wibowo. 2009. *Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Orgaisasi, Gaya Kepemimpinan dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor*. Skripsi FE UII. Yogyakarta
- Ihyaul Ulum. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Mutivariat dengan SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Iyos dan Arifin Lubis. 2007. *Pemgaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Bekerja, Kecakapan Professional, Indepenndensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Jurnal Akuntansi
- Mudrajat Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.